



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DPPKB)
KABUPATEN SIGI**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

Dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi untuk lima tahun kedepan.

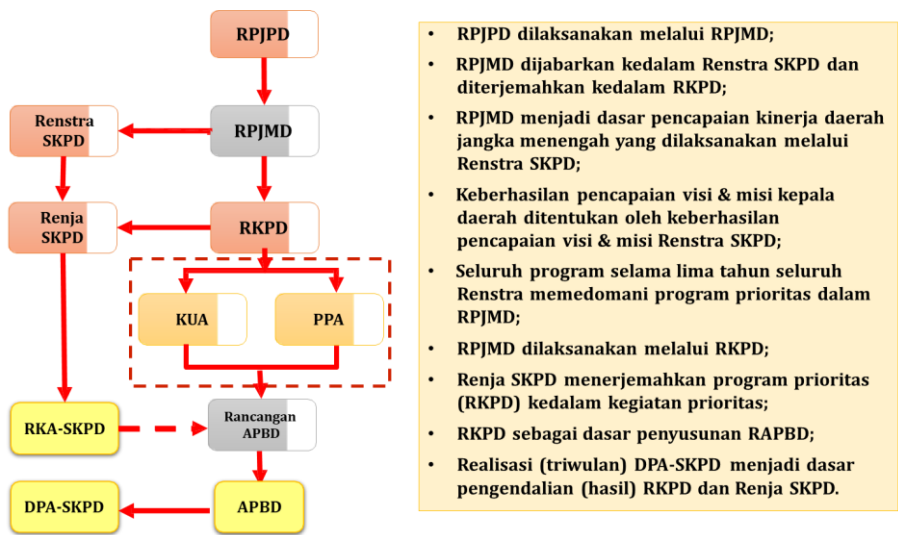


Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) daerah, dokumen perencanaan jangka panjang daerah serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang baik propinsi maupun nasional.

Adapun keterkaitan dokumen perencanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bagan dibawah ini :



Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi yang telah ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA), sebagai penjabaran lebih rinci dari program, kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk tahun berkenaan.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sigi Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Sigi Nomor 125);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 150);
22. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025 nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan- kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sigi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi; dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.



1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPPKB Kab. Sigi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

Tugas dan Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1. Kedudukan

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Keluarga Berencana (KB).



- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi DPPKB

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi terdiri atas :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menyelenggarakan tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- c. Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ;
- d. Penyiapan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik Negara/Daerah dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Asset

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset, dalam melaksanakan tugas

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Asset menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusun rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



- (2) Menyusun dan menyiapkan RKA/DPA;
- (3) Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
- (4) Pemeliharaan dan penyiapan bukti dan dokumen;
- (5) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- (6) Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (7) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pelaksanaan penatausahaan/ pengurusan dan penyimpanan aset;
- (8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (9) Pemberian saran pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2). Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan, subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi jabatan, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
- f. Penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- g. Penyiapan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan Pemberian saran dan pertimbangan kepada.
- i. pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1) Kelompok Fungsional/Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penyuluhan, pendayagunaan Petugas Lapangan



Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana. Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana menyelenggaraan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penyuluhan, pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana;
- c. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Kader Keluarga Berencana;
- e. Penyiapan bahan penguasaan potensi wilayah kerja dibidang penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- f. Penyiapan bahan pembentukan kader, pelatihan, orientasi, bimbingan teknis, workshop dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dibidang penyuluhan, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. Penyiapan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan konseling.;
- h. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



(2) Fungsional Advokasi dan Penggerakan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Advokasi dan Penggerakan. Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang advokasi dan penggerakan;
- b. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan penggerakan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dibidang Advokasi dan Pergerakan;
- e. Penyiapan penyusunan program dan kegiatan dibidang Advokasi dan Pergerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Penyiapan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Iklan layanan Keluarga Berencana, Baliho dan Papan Motivasi Keluarga Berencana;
- g. Penyiapan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui sarana Mobil Unit Penerangan (MUPEN) Keluarga Berencana;
- h. Penyiapan koordinasi pelaksanaan hari-hari yang berhubungan dengan keluarga dan lomba-lomba dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional;
- i. Penyiapan penggerakan tokoh agama (TOGA) dan masyarakat (TOMA) dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- j. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



(3) Fungsional Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- e. Penyiapan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- g. Penyiapan penetapan perkiraan sasaran program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. Penyiapan bahan sistem informasi keluarga dalam manajemen operasional program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- i. Penyiapan bahan pendataan, pemutahiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga;
- j. Penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dari aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk;
- k. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- l. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan



- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan remaja;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR); dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- i. Pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(1) Fungsional Jaminan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan jaminan keluarga berencana. Seksi Jaminan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang jaminan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang jaminan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang jaminan keluarga berencana;
- d. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- e. Penyiapan bahan penetapan dan pengembangan/ perluasan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- f. Penyiapan bahan penetapan sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, peningkatan sasaran Unmet Need, peningkatan sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta peningkatan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- g. alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi serta pelaksanaan Informed Choice dan Informed Consent dalam pelayanan keluarga berencana;
- i. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2) Fungsional Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan pembinaan kesertaan keluarga berencana. Seksi pembinaan kesertaan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang jaminan keluarga berencana;



- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- d. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- e. Penyiapan bahan penjaminan ketersediaan, pelaksanaan pengadaan dan distribusi alat/obat kontrasepsi dengan prioritas keluarga miskin;
- f. Penyiapan bahan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- g. Penyiapan sasaran peningkatan partisipasi pria dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi;
- h. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Fungsional Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan Bina Keluarga Balita (BKB);
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK-R/M);



- f. Penyiapan bahan pelaksanaan Bina Keluarga Langsia (BKL);
- g. Penyiapan bahan Pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) melalui usaha mikro keluarga;
- h. Penyiapan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pertemuan-pertemuan, orientasi kelompok ekonomi produktif Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki sumber daya berikut:

- **Tenaga yang dipekerjakan khusus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat ini sebanyak:**
 - a. Pejabat Eselon II : 1 Orang
 - b. Pejabat Eselon III : 3 Orang
 - c. Pejabat Eselon IV : 2 Orang
 - d. Tenaga Staf(ASN) : 54 Orang
 - e. Tenaga Staf (Kontrak) : 7 Orang
 - f. Tenaga Penyuluh KB ASN : 45 Orang



➤ **Tenaga Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang dimiliki sekarang antara lain :**

- a. PPKBD : 176 Orang
- b. Sub PPKBD : 510 Orang
- c. Kelompok BKB : 62 Kelompok
- d. Kelompok BKR : 28 Kelompok
- e. Kelompok BKL : 30 Kelompok
- f. Kelompok UPPKS : 20 Kelompok

➤ **Fasilitas Kesehatan (Faskes) Pelayanan Keluarga Berencana KB :**

- a. Faskes KB : 25 Faskes
- b. Dokter Praktek Swasta : 0 Orang
- c. Bidan Praktek Swasta : 5 Orang
- d. PIK – REMAJA : 30 Kelompok

➤ **Sarana dan Prasarana Pendukung**

Untuk melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan-undangan, kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	JENIS	VOLUME	SATUAN	KET
1	Roda 4	5	Unit	
2	Roda 2	57	Unit	
3	Komputer	18	Unit	APBD dan DAK
4	Laptop	9	Unit	
5	PC Tablet	3	Unit	
6	Meja ½ Biro	19	Buah	
7	Meja Biro	6	Buah	
8	Lemari Penyimpanan	14	Buah	
9	Rak Penyimpanan	1	Unit	
10	Lemari Kayu	9	Unit	
11	Kursi Chitos	110	Buah	



No	JENIS	VOLUME	SATUAN	KET
12	IUD Kit	1	Set	
13	Implant Removal Kit	1	Set	
14	BKB Kit Stunting	25	Set	
15	Papan Pengumuman	15	Buah	
16	Scanner	11	Buah	
17	Balai Penyuluh KB	15	Unit	
18	Brankas	1	Unit	
19	Papan Nama Dinas dan Papan Informasi	15	Buah	
20	Kursi Tamu DPPKB	2	Unit	
22	Almari Arsip	16	Unit	
23	Brankas	1	Unit	
24	Papan Nama Dinas dan Papan Informasi	15	Buah	
25	Kursi Tamu DPPKB	2	Unit	
27	Almari Arsip	16	Unit	
28	Kipas Angin	2	Unit	
29	LCD/Proyektor	22	Unit	
30	TV	1	Unit	
31	Printer	18	Unit	
32	Kursi Plastik	116	Buah	
33	Kursi Tunggu	1	Buah	
34	Genset	6	Unit	
35	Meteran Listrik	14	Buah	
36	Mesin Absensi	1	Buah	
37	Kursi Putar	13	Buah	
39	Meja Rapat	20	Buah	
40	AC	13	Unit	

Sumber: DPPKB Kabupaten Sigi Tahun 2025, Data diolah



Jumlah peralatan di atas secara umum masih kurang jika dibandingkan beban kerja yang cukup tinggi, jenis peralatan yang sering digunakan tetapi kurang jumlahnya dan tidak berfungsi optimal.

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan Perangkat Daerah yang telah diberikan kepada Masyarakat Kabupaten Sigi sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama ini sebagai berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja (IKU) Pelayanan Perangkat Dinas Pengendalian
Penduduk dan keluarga Berencan Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	IKU:													
1	Persentase Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	100	100	100	100	100	2,56	18,87	2.32	N/A	2,56	18,87	2.32
2	Persentase Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive Prevalance Rate/mPCR) %	%	100	100	100	100	100	49,06	63,62	63,55		49,06	63,62	63,55
3	persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	100	100	100	100	100	27,64	16,1	12,46		27,64	16,1	12,46



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja (IKK) Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	IKK													
1	Persentase Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	%	N/A	N/A	N/A			2,56	18,87	2.32	N/A	2,56	18,87	2.32
2	Persentase Angka prevalensi kontrasepsi modern (modern contraceptive Prevalance Rate/mPCR) %	%	N/A	N/A	N/A			49,06	63,62	63,55		49,06	63,62	63,55
3	persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	%	N/A	N/A	N/A			27,64	16,1	12,46		27,64	16,1	12,46
4	Persentase Fasilitas Kesehatan (FASKES) yang Siap Melayani KB MKJP	%	N/A	N/A	N/A			62,50				62,50		
5	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	N/A	N/A	N/A			49,50				49,50		
6	Persentase Kelompok Kerja (KKBPK) yang efektif	%	N/A	N/A	N/A			100				100		
7	Persentase KB Pasca persalinan	%	N/A	N/A	N/A			29,44				29, 44		
8	Persentase Kesertaan KB di Kabupaten Kota dengan Kesertaan Rendah	%	N/A	N/A	N/A			18,96				18,96		
9	Persentase Kesertaan KB penerima Bantuan iurana PBI	%	100	100	100			72,14				72,14		



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3,595,693,444	3,406,851,793	3,223,876,631	2.737790.297
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		2.607.116.000	55.920.000	784.352.716
3	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	5.605.583.197	4.403.758.126	5.813.209.000	8.810.515.000
4	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	12.207.500			

No	Program	Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.428.658.024	3.281.407.398	3.099.164.338	2.607.327.299
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		2.503.200.000	55.920.000	773.860.447
3	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	5.531.079.271	4.011454.151	5.462.893.670	8.586.627.946
4	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	12.207.500			



No	Program	Persentase Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.)			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,35 %	96.32%	96,13%	95,41%
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		96,01%	100%	98,66%
3	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	98,67%	91,09%	93,97%	97,46%
4	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	100%			

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur, Remaja Keluarga dan para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis Pembangunan yang secara langsung bertujuan untuk mengendalikan Pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas Keluarga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

- 1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)
Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2. Perangkat Daerah Kabupaten Sigi
Sebagai Mitra Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan.



4. Masyarakat

Terlibat secara langsung melalui proses Penyuluhan Pendampingan dan Pembinaan Keluarga sebagai penerima manfaat akhir dari arah pembangunan pengendalian Penduduk yang ditetapkan.

2.2 Pemasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sigi cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur).

Pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan penting dalam meningkatkan keluarga berkualitas dan Sejahtera di daerah yang merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

Permasalahan

Permasalahan yang di hadapi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sigi adalah :

1. Masih rendahnya dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
2. Masih tingginya Pertumbuhan Penduduk menyebabkan meningkatnya masalah sosial, ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia.
3. Masih ada keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi yang berdampak pada kualitas keluarga.
4. Masih rendahnya pengetahuan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program KB yg berdampak pada Kesejahteraan Kualitas keluarga.



5. Intervensi Stunting masih memerlukan penanganan yang komprehensif. dengan penguatan pada pemahaman gizi seimbang, Pola asuh bayi balita dan Peningkatan edukasi informasi layanan kesehatan bagi remaja dan calon pengantin.
6. Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB.
7. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal.
8. Peran bidan dan tenaga Penyuluh lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Peningkatan pelayanan melalui dukungan stakeholder Perangkat daerah dengan kebijakan program yang secara langsung berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Peningkatan Kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang berdampak pada kualitas keluarga yang sejahtera.
3. Pemerataan Akses Pelayanan Keluarga Berencana terutama daerah terpencil dan memastikan semua Keluarga mendapatkan pelayanan serta memiliki kesempatan yang sama merencanakan keluarga.
4. Peningkatan Kualitas keluarga berfokus pada pendidikan anak usia dini, remaja, Calon Pengantin, kesehatan reproduksi, Polah asuh 100 HPK dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
5. Kolaborasi lintas sektor koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pengendalian penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas sosial, perangkat daerah terkait serta organisasi masyarakat sangat penting untuk menurunkan prevalensi stunting.
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengendalian penduduk melalui penyediaan informasi online, aplikasi mobile dan media sosial.
7. Peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Penyuluh Keluarga Berencana, Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa Melalui Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kelompok Kerja BKB, BKR, BKL dan PIK Remaja.



Tabel 2. 5
Tabel Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis - Global	Isu Lingkungan Dinamis - Nasional	Isu Lingkungan Dinamis - Regional	Isu Strategis PD
Ketersediaan Perangkat Daerah untuk mendukung fungsi pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Program kegiatan PD terkait belum terintegrasi	Penguatan kerja sama di sertai kebijakan Pemda	Transformasi digital dan big data	Arah RPJMN 2025-2029	Kolaborasi lintas sektor	Kerjasama Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam mendukung pengendalian penduduk
Ketersediaan tenaga sarana prasarana						
Ketersediaan Alat Kontrasepsi	Kesadaran kesertaan PUS utk ber KB belum merata	Peningkatan Pelayanan				
Ketersediaan SIPD dan basis data sektoral yang dapat diintegrasikan	Integrasi data perencanaan lintas PD belum optimal	Integrasi perencanaan pembangunan lintas sektor	Keterbukaan data pembangunan	Sistem perencanaan terintegrasi nasional	Integrasi data antar kabupaten/ kota	Peningkatan integrasi sistem informasi pembangunan
Dukungan regulasi nasional terkait inovasi daerah dan riset	Pendanaan riset dan inovasi relatif kecil	Pengembangan riset inovasi berkelanjutan	Inovasi teknologi untuk pembangunan berkelanjutan	Kebijakan inovasi daerah berbasis riset	Pengembangan inovasi sesuai potensi wilayah	Optimalisasi anggaran untuk inovasi dan penelitian terapan
Tersedia infrastruktur dasar TIK dan aset fisik meski perlu modernisasi	Pemanfaatan sarana prasarana belum maksimal	Pengelolaan sarana prasarana publik	Smart infrastructure global trend	Modernisasi sarana prasarana pemerintahan	Pemanfaatan infrastruktur TIK regional	Modernisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung riset



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2025-2030

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis, evaluasi kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kabupaten Sigi.

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil utama yang ingin dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah pembangunan, berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2030.



TABEL 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPPKB Kabupaten Sigi tahun 2025-2030

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkatnya Keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	Meningkatkan kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	60,08	61,24	62,4	63,56	64,72	65,88	67,04	PK
Meningkatnya Peran pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
		Meningkatkan kesertaan Ber KB pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	60	62	64	66,1	68,3	70,6	72,9	Laporan IPBK



			Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)		2,3	2,29	2,28	2,28	2,27	2,26	Sensus, SUPAS, PK
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 (age spesifik fertility rate/ASFR 15-19		41,9	41,2	40,6	40	39,4	38,8	Sensus Supas, PK
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarkat dalam pembinaan masyarakat	Proporsi KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Proportion of demand satisfield by modern)		81,4	81,5	81,6	81,8	81,9	82	PK
			Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)		15,1	14,2	13,3	12,5	11,7	11	PK
		Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Lansia Berdaya		62,5	63,2	63,9	64,6	65,3	66	PK



			Indeks Pengasuhan Remaja		85,5	86,5	87,4	88,5	89,5	90.5	PK
			Proporsi Kampung KB Mandiri		8,9	6,4	6,9	7,4	8	8,6	Website kampung KB



3.2. STRATEGI RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi telah merumuskan tahapan strategi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2025–2029. Tahapan Strategi ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi, dengan menitikberatkan pada penguatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data. Renstra ini juga diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan yang dinamis, memperkuat sinergi antar- perangkat daerah, serta memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target pembangunan daerah. Strategi yang dirumuskan akan menjadi dasar dalam penetapan program, kegiatan, dan indikator kinerja, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel penahapan strategi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029.

TABEL 3. 2
Penahapan Renstra DPPKB Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendataan Keluarga Sasaran dan pemetaan isu utama terkait Pola asuh dan Kesehatan Keluarga	Edukasi dasar tentang pola asuh anak, komunikasi dalam keluarga dan peran ayah ibu dalam pengasuhan	Pelatihan kesehatan keluarga, gizi seimbang dan penguatan peran keluarga dalam pencegahan stunting dan kekerasan	Penguatan kelembagaan kampung keluarga (Kampung KB) dan kader ketahanan keluarga tingkat desa	Evaluasi dampak intervensi terhadap kualitas hidup kelurga dan pengintegrasian program keluarga kedalam kebijakan pembangunan desa
Pedataan Keluarga dan pemetaan potensi usaha rumah tangga	Pelatihan kewirahusahaan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE)	Fasilitasi sarana produksi dan akses pembiayaan mikro keluarga	Pendampingan produksi dan perluasan akses pasar produk rumah tangga	Evaluasi dampak ekonomi keluarga dan penguatan jejaring usaha komunitas
Penguatan dan Pemahaman SDM Tentang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga berencana dengan tujuan Mengendalikan dan menurunkan	Membangun kolaborasi Koordinasi implementasi tim kerja antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Meningkatkan penurunan pertumbuhan penduduk, menyusun jadwal dan	Sinkronisasi Sinkorninisasi program antar Organanisasi dalam Mengendalikan pertumbuhan Penduduk dlm meningkatkan keluarga berkualitas serta	Penyempurnaan proses pelaksanaan pengendalian penduduk melalui pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan pendidikan dan kemampuan aparat penyuluh KB dan	Optimalisasi dan Keberlanjutan Evaluasi keseluruhan program, penyusunan rencana perbaikan, dan memastikan keberlanjutan kolaborasi antara



pertumbuhan penduduk dalam rangka meningkatkan Kualitas Keluarga	memastikan pelaksanaan tepat waktu	mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan dengan mengutamakan kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat	masyarkat dengan mengevaluasi pelaksanaan Pelaksanaan Penyuluhan, Pembinaan, Pendampingan keluarga serta kolaborasi dan mempercepat implementasi dan koordinasi yang lebih baik.	pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
--	------------------------------------	--	--	--

3.3. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPPKB KABUPATEN SIGI TAHUN 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pengenndalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi 2025-2029 difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM, kolaborasi masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan yang tepat waktu. Selain itu, penerapan teknologi dan riset dalam perencanaan pembangunan juga menjadi prioritas utama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan universitas, diharapkan tercipta Pembangunan keluarga yang berkualitas.

Tabel berikut memuat rinciannya mengenai operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029.

TABEL 3. 3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	2	3	4	5
	Meningkatnya keluarga berkualitas	Pembangunan keluarga berkualitas melalui penguatan fungsi keluarga edukasi pola asuh dan kesehatan keluarga	Meningkatkan Kolaborasi lintas sektor koordinasi dan kerjasama antara Dinas Pengendalian penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas sosial, perangkat daerah terkait serta organisasi masyakatat sangat penting untuk menurunkan prevalensi stunting.	
			meningkatkan Kualitas keluarga berfokus pada pendidikan anak usia dini, remaja, Calon Penganting, kesehatan reproduksi, Polah asuh 1000 HPK dan pemberdayaan ekonomi keluarga.	



			Masih rendahnya pengetahuan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam program KB yg berdampak pada Kesejahteraan Kwalitas keluarga.	
			Meningkatkan pelayanan melalui dukungan stakehoulder Perangkat daerah dengan kebijakan program yang secara langsung berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	
		Pemberdayaan ekonomi Keluarg berbasis komunitas untuk meningkatkan ketahanan keluargadan kesejahteraan keluarga.	Meningkatkan Kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang berdampak pada kualitas keluarga yang sejahtera.	
			Meningkatan kapasitas Sumber daya Manusia Penyuluh Keluarga Berencana, Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembina Penyuluh Keluarga Berencana Desa Melalui Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kelompok Kerja BKB,BKR,BKL dan PIK Remaja.	
			Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengendalian penduduk melalui penyediaan informasi online, aplikasi mobile dan media soial.	



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 mengarah pada peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan riset dan inovasi. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan efektivitas perencanaan dan penerapan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan hasil riset yang berbasis data dan inovasi. Dengan menciptakan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor.

Pada bagian berikut ini, disajikan tabel yang merinci tujuan, sasaran, outcome, output, indikator, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah- langkah operasionalisasi kebijakan dan pencapaian yang diharapkan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sigi.



Tabel 4. 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPPKB Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkatnya Keluarga berkualitas dan Kesetaraan Gender	Meningkatkatnya Keluarga berkualitas				Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)		
Meningkat nya Peran Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Daerah							
	Meningkatkan peran Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan kesertaan Ber KB pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.	Terkendalnya pertambahan Penduduk	peserta KB aktif	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
					Total Fertility Rate/TFR	Program Pengendalian Penduduk	
					kelahiran Remaja umur 15 - 19 tahun (age spesifik fertility rate/ASFR 15-19	Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan Pemerintah daerah	



						Kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.	
						Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS jalur formal dan informal	
						Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan non formal	
		Meningkatkan Kesertaan Ber KB	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga	Prevalensi peserta KB aktif	Proporsi KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (propotion of demand satisfield by modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana	
					Persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Pelaksanaan advokasi Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana sesuai kearifan Lokal	
						Penyediaan dan distribusi sarana KIE Program Bangga Kencana	
						Pengelolaan Oprasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	
						Promosi KIE program bangga kencana melalui media masa cetak dan elektronik dan media	



						luar ruang	
						Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten kota	
						Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasiiitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaring lainnya	
						Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	
		Meningkatkan Kesejahteraan keluarga	Meningkantnya pemberdayaan dan peran serta masyarkat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)		Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
					Indeks lansia berdaya		
					Indeks pengasuhan remaja		
					Proporsi Kampung KB madiri		



4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DPPKB Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030 dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah disusun tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga evaluasi yang terstruktur untuk mengukur pencapaian hasil dan kinerja pembangunan secara menyeluruh. Fokus utama adalah meningkatkan kualitas keluarga Sejahtera dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada perencanaan, pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi antar berbagai sektor dan stakeholder yang terintegrasi.

Program-program yang direncanakan dalam Renstra ini akan difokuskan pada keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang melibatkan analisis data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, sistem informasi dan pengelolaan data juga akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Pendanaan yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan telah disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan sumber daya yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan rincian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi untuk periode 2026-2030, yang menggambarkan target, output, serta pagu anggaran yang diperlukan untuk setiap tahunnya.

Tabel 4. 2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DPPKB
Kabupaten Sigi Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.400.906.000,00		9.588.924.119,00		9.780.702.601,00		9.976.316.653,00		10.175.842.987,00		
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.482.457.502,00		2.532.106.651,00		2.582.748.784,00		2.634.403.760,00		2.687.091.835,00		
Meningkatnya Kelancaran Administrasi Keseekretariatan				5.482.457.502,00		2.532.106.651,00		2.582.748.784,00		2.634.403.760,00		2.687.091.835,00	2.14.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.14.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.399.997,00		36.399.995,00		36.399.995,00		36.399.995,00		36.399.995,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	6.399.997,00	100	36.399.995,00	100	36.399.995,00	100	36.399.995,00	100	36.399.995,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	100	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00		
2.14.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00		
2.14.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	100	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00		
2.14.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				228.571,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		4.514.285,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	100	100	228.571,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00	100	4.514.285,00		
2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.436.781.864,00		2.437.781.864,00		2.447.281.864,00		2.444.531.864,00		2.452.781.864,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	2.436.781.864,00	100	2.437.781.864,00	100	2.447.281.864,00	100	2.444.531.864,00	100	2.452.781.864,00		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.433.781.864,00		2.433.781.864,00		2.433.781.864,00		2.433.781.864,00		2.433.781.864,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100	100	2.433.781.864,00	100	2.433.781.864,00	100	2.433.781.864,00	100	2.433.781.864,00	100	2.433.781.864,00		
2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.800.000,00		3.200.000,00		7.000.000,00		15.900.000,00		39.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	2.800.000,00	100	3.200.000,00	100	7.000.000,00	100	15.900.000,00	100	39.200.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100					
2.14.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00		11.600.000,00		31.600.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	100	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	1.600.000,00	100	11.600.000,00	100	31.600.000,00		
2.14.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.600.000,00		11.600.000,00		20.600.000,00		11.600.000,00		21.600.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	100	1.600.000,00	100	11.600.000,00	100	20.600.000,00	100	11.600.000,00	100	21.600.000,00		
2.14.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.600.000,00		11.600.000,00		20.600.000,00		11.600.000,00		21.600.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	100	100	1.600.000,00	100	11.600.000,00	100	20.600.000,00	100	11.600.000,00	100	21.600.000,00		
2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.200.000,00		10.649.150,00		22.049.150,00		34.500.000,00		34.400.000,00		
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	5.200.000,00	100	10.649.150,00	100	22.049.150,00	100	34.500.000,00	100	34.400.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	100		100		100		100		100			
2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.600.000,00		5.849.150,00		5.849.150,00		21.600.000,00		11.600.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	100	1.600.000,00	100	5.849.150,00	100	5.849.150,00	100	21.600.000,00	100	11.600.000,00		
2.14.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.001.800.000,00		2.400.000,00		8.100.000,00		6.450.000,00		11.400.000,00		
Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100	3.001.800.000,00	100	2.400.000,00	100	8.100.000,00	100	6.450.000,00	100	11.400.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1											
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	100				100				100			
2.14.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.875.637,00		22.275.637,00		26.075.637,00		38.900.000,00		42.200.000,00		
Tersusunnya Dokumen Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	100	21.875.637,00	100	22.275.637,00	100	26.075.637,00	100	38.900.000,00	100	42.200.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100		100				100		100			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.675.637,00		7.675.637,00		7.675.637,00		21.600.000,00		21.600.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	7.675.637,00	100	7.675.637,00	100	7.675.637,00	100	21.600.000,00	100	21.600.000,00		
2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	100	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00		
2.14.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00		2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6.000.004,00		7.800.005,00		15.242.138,00		46.121.901,00		49.109.976,00		
Tersusunnya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	6.000.004,00	100	7.800.005,00	100	15.242.138,00	100	46.121.901,00	100	49.109.976,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100				100							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100				100							
2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.600.000,00		5.300.000,00		10.600.000,00		11.600.000,00		11.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	100	1.600.000,00	100	5.300.000,00	100	10.600.000,00	100	11.600.000,00	100	11.600.000,00		
2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.800.004,00		1.700.005,00		1.942.138,00		32.371.901,00		33.709.976,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100	100	3.800.004,00	100	1.700.005,00	100	1.942.138,00	100	32.371.901,00	100	33.709.976,00		
2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000,00		800.000,00		2.700.000,00		2.150.000,00		3.800.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100	100	600.000,00	100	800.000,00	100	2.700.000,00	100	2.150.000,00	100	3.800.000,00		
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				675.563.722,00		689.074.996,00		702.856.496,00		716.913.626,00		731.251.899,00		
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,31	2,29	675.563.722,00	2,28	689.074.996,00	2,28	702.856.496,00	2,27	716.913.626,00	2,26	731.251.899,00	2.14.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	42,5	41.2-41.2		40.6-40.6		40-40		39.4-39.4		38.8-38.8			
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	60,00	62,70		64,00		65,30		66,30		66,70			
2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				217.739.999,00		218.899.999,00		218.899.499,00		218.899.999,00		218.900.000,00		
Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	217.739.999,00	100	218.899.999,00	100	218.899.499,00	100	218.899.999,00	100	218.900.000,00		
	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				559.999,00		559.999,00		559.999,00		559.999,00		560.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	0	1	559.999,00	1	559.999,00	1	559.999,00	1	559.999,00	1	560.000,00		
2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)	100	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00	100	34.000.000,00		
2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				18.560.000,00		18.560.000,00		18.560.000,00		18.560.000,00		18.560.000,00		
Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	100	100	18.560.000,00	100	18.560.000,00	100	18.560.000,00	100	18.560.000,00	100	18.560.000,00		
2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00		
2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		
Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)	100	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00		
2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		
Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	100	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00		
2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota				1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		
Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)	100	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				34.560.000,00		34.560.000,00		34.560.000,00		34.560.000,00		34.560.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)	100	100	34.560.000,00	100	34.560.000,00	100	34.560.000,00	100	34.560.000,00	100	34.560.000,00		
2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00		
2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)				30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		30.300.000,00		
Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)	100	100	30.300.000,00	100	30.300.000,00	100	30.300.000,00	100	30.300.000,00	100	30.300.000,00		
2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1.740.000,00		2.900.000,00		2.899.500,00		2.900.000,00		2.900.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	100	1.740.000,00	100	2.900.000,00	100	2.899.500,00	100	2.900.000,00	100	2.900.000,00		
2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				53.180.000,00		53.180.000,00		53.180.000,00		53.180.000,00		53.180.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah)	100	100	53.180.000,00	100	53.180.000,00	100	53.180.000,00	100	53.180.000,00	100	53.180.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				457.823.723,00		470.174.997,00		483.956.997,00		498.013.627,00		512.351.899,00		
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	100	100	457.823.723,00	100	470.174.997,00	100	483.956.997,00	100	498.013.627,00	100	512.351.899,00		
	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	100	100				100				100			
	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	100	100				100				100			
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	100	100				100				100			
	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	100	100				100				100			
	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	100	100				100				100			
	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	100	100				100				100			
	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	100	100				100				100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				53.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00		53.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	100	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00		
2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)	100	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00	100	90.000.000,00		
2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga				53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)	100	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00		
2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		
Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	100	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00		
2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		53.100.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	100	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00	100	53.100.000,00		
2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana				1.160.000,00		13.511.274,00		27.293.274,00		41.349.904,00		55.688.176,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)	100	100	1.160.000,00	100	13.511.274,00	100	27.293.274,00	100	41.349.904,00	100	55.688.176,00		
2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan				1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		1.740.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)	100	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00	100	1.740.000,00		
2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellai Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)	100	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00		
2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB				37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		
Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)	100	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00		
2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				35.503.723,00		35.503.723,00		35.503.723,00		35.503.723,00		35.503.723,00		
Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)	100	100	35.503.723,00	100	35.503.723,00	100	35.503.723,00	100	35.503.723,00	100	35.503.723,00		
2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)				37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		37.880.000,00		
Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)	100	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00	100	37.880.000,00		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				5.942.884.776,00		6.061.742.472,00		6.182.977.321,00		6.306.636.867,00		6.432.769.605,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	16,1	14,2	5.942.884.776,00	13,3	6.061.742.472,00	12,5	6.182.977.321,00	11,7	6.306.636.867,00	11	6.432.769.605,00	2.14.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	63,55	63,67		63,68		63,69		63,70		63,71			
	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (%)	81,3	81,5		81,6		81,8		81,9		82			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.413.486.776,00		1.417.402.472,00		1.421.396.480,00		1.425.470.369,00		1.429.625.737,00			
Presentase pelaksanaan advokasi, komunikasi dan edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	100	100	1.413.486.776,00	100	1.417.402.472,00	100	1.421.396.480,00	100	1.425.470.369,00	100	1.429.625.737,00			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	100	100				100				100				100
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	100	100				100				100				100
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	100	100				100				100				100
	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	100	100				100				100				100
	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	100	100				100				100				100
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	100	100				100				100				100
	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK						233.450.000,00				233.450.000,00				233.450.000,00
Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	100	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00			
2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana				227.784.756,00		231.700.452,00		235.694.460,00		239.768.349,00		243.923.717,00			
Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	100	100	227.784.756,00	100	231.700.452,00	100	235.694.460,00	100	239.768.349,00	100	243.923.717,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00		
2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				393.802.020,00		393.802.020,00		393.802.020,00		393.802.020,00		393.802.020,00		
Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	100	100	393.802.020,00	100	393.802.020,00	100	393.802.020,00	100	393.802.020,00	100	393.802.020,00		
2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		42.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	100	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00		
2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal				83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		83.000.000,00		
Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)	100	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00	100	83.000.000,00		
2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				233.450.000,00		233.450.000,00		233.450.000,00		233.450.000,00		233.450.000,00		
Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	100	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00	100	233.450.000,00		
2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.520.400.000,00		1.520.400.000,00		1.520.400.000,00		1.520.400.000,00		1.520.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan pengelolaan operasional dan saran di balai penyuluh bangsa kencana	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	100	100	1.520.400.000,00	100	1.520.400.000,00	100	1.520.400.000,00	100	1.520.400.000,00	100	1.520.400.000,00		
	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	100	100				100				100			
	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	100	100				100				100			
	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	100	100				100				100			
2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)	100	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00	100	450.000.000,00		
2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		
Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	100	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00	100	430.000.000,00		
2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				392.000.000,00		392.000.000,00		392.000.000,00		392.000.000,00		392.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	100	100	392.000.000,00	100	392.000.000,00	100	392.000.000,00	100	392.000.000,00	100	392.000.000,00		
2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				248.400.000,00		248.400.000,00		248.400.000,00		248.400.000,00		248.400.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	100	100	248.400.000,00	100	248.400.000,00	100	248.400.000,00	100	248.400.000,00	100	248.400.000,00		
2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2.321.898.000,00		2.427.840.000,00		2.363.080.841,00		2.664.666.498,00		2.786.643.868,00		
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	100	100	2.321.898.000,00	100	2.427.840.000,00	100	2.363.080.841,00	100	2.664.666.498,00	100	2.786.643.868,00		
	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						22.500.000,00				22.500.000,00			
Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	100	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				928.871.000,00		928.871.000,00		928.871.000,00		928.871.000,00		928.871.000,00		
Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	100	100	928.871.000,00	100	928.871.000,00	100	928.871.000,00	100	928.871.000,00	100	928.871.000,00		
2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	100	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00	100	46.000.000,00		
2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	0	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00	1	550.000,00		
2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				9.000.000,00		114.942.000,00		50.182.841,00		351.768.498,00		473.745.868,00		
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	100	100	9.000.000,00	100	114.942.000,00	100	50.182.841,00	100	351.768.498,00	100	473.745.868,00		
2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria				1.577.000,00		1.577.000,00		1.577.000,00		1.577.000,00		1.577.000,00		
Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)	100	100	1.577.000,00	100	1.577.000,00	100	1.577.000,00	100	1.577.000,00	100	1.577.000,00		
2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				597.000.000,00		597.000.000,00		597.000.000,00		597.000.000,00		597.000.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)	100	100	597.000.000,00	100	597.000.000,00	100	597.000.000,00	100	597.000.000,00	100	597.000.000,00		
2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan				716.400.000,00		716.400.000,00		716.400.000,00		716.400.000,00		716.400.000,00		
Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)	100	100	716.400.000,00	100	716.400.000,00	100	716.400.000,00	100	716.400.000,00	100	716.400.000,00		
2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				687.100.000,00		696.100.000,00		878.100.000,00		696.100.000,00		696.100.000,00		
Persentase Peserta KB aktif	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	100	100	687.100.000,00	100	696.100.000,00	100	878.100.000,00	100	696.100.000,00	100	696.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	100	100		100		100		100		100			
2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas				594.000.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00		603.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	100	100	594.000.000,00	100	603.000.000,00	100	603.000.000,00	100	603.000.000,00	100	603.000.000,00		
2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas				46.550.000,00		46.550.000,00		46.550.000,00		46.550.000,00		46.550.000,00		
Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	100	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00		
2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				46.550.000,00		46.550.000,00		228.550.000,00		46.550.000,00		46.550.000,00		
Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	100	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00	100	228.550.000,00	100	46.550.000,00	100	46.550.000,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	61,8	63,2	300.000.000,00	63,9	306.000.000,00	64,6	312.120.000,00	65,3	318.362.400,00	66	324.729.648,00	2.14.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	84,5	86,5		87,4		88,5		89,5		90,5			
	Proporsi Kampung KB Mandiri (%)	5,5	6,4		6,9		7,4		8		8,6			
2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				244.580.000,00		246.900.000,00		246.900.000,00		246.900.000,00		246.900.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	100	100	244.580.000,00	100	246.900.000,00	100	246.900.000,00	100	246.900.000,00	100	246.900.000,00		
	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	100	100		100		100		100		100			
	2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						1.160.000,00				3.480.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	100	100	1.160.000,00	100	3.480.000,00	100	3.480.000,00	100	3.480.000,00	100	3.480.000,00		
2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	100	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00		
2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		
Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	100	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00		
2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		
Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	100	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		53.760.000,00		
Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	100	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00	100	53.760.000,00		
2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				22.580.000,00		22.580.000,00		22.580.000,00		22.580.000,00		22.580.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)	100	100	22.580.000,00	100	22.580.000,00	100	22.580.000,00	100	22.580.000,00	100	22.580.000,00		
2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				55.420.000,00		59.100.000,00		65.220.000,00		71.462.400,00		77.829.648,00		
terselenggaranya pelatihan keterampilan ekonomi bagi ibu dan perempuan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100	55.420.000,00	100	59.100.000,00	100	65.220.000,00	100	71.462.400,00	100	77.829.648,00		
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	100	100				100				100			
	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	100	100				100				100			
	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	100	100				100				100			
2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		
Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				50.780.000,00		50.780.000,00		50.780.000,00		50.780.000,00		50.780.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	100	100	50.780.000,00	100	50.780.000,00	100	50.780.000,00	100	50.780.000,00	100	50.780.000,00		
2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		1.160.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	100	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00	100	1.160.000,00		
2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga				2.320.000,00		6.000.000,00		12.120.000,00		18.362.400,00		24.729.648,00		
Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)	100	100	2.320.000,00	100	6.000.000,00	100	12.120.000,00	100	18.362.400,00	100	24.729.648,00		



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025- 2029

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029 telah merumuskan berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Kualitas Keluarga daerah secara holistik dan berkelanjutan. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut, program prioritas ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang dirancang untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan.

Sub kegiatan yang diidentifikasi dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas Kualitas Keluarga secara merata yang membutuhkan koordinasi dan melibatkan berbagai perangkat daerah dan *stakeholder* terkait. Kegiatan ini meliputi strategi meningkatkan Peran Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana untuk Pemerataan Kualitas Keluarga di daerah.

Pentingnya penguatan peran Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah juga menjadi prioritas dalam sub kegiatan ini. Dengan meningkatkan Advokasi Pendampingan, Penyuluhan, Pembinaan Keluarga, Promosi yang merata diharapkan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap permasalahan daerah terkait peran pengendalian penduduk dan Keluarga berencana di daerah.

Tabel berikut ini merinci sub kegiatan prioritas yang akan dijalankan oleh dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, dengan fokus peningkatan kualitas keluarga pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Sigi tahun 2025-2029.

TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Kesekretariatan	2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.14.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			2.14.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
2.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
3.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
			2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	



**4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025-
2030**

Dalam rangka mengukur keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Sigi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan daerah. IKU ini menjadi alat ukur yang penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diimplementasikan dapat mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

IKU yang digunakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi Tahun 2025 - 2030 mencakup dua indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) dan Indeks Pembangunan Berwawasan Inovasi Daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah mengukur kualitas dan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan, sedangkan Indeks Inovasi Daerah mengukur sejauh mana inovasi yang diterapkan dapat mendukung pengembangan daerah, baik dari aspek pemerintahan, ekonomi, maupun sosial.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja masing-masing indikator untuk tahun 2025 hingga 2030, dengan harapan bahwa setiap tahun akan ada peningkatan signifikan dalam kualitas perencanaan dan penerapan inovasi yang mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Bapperida Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2030

INDAKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan IPBK	%	61,30	62,70	64,00	65,30	66,30	66,70	
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	%	61,24	62,35	63,50	64,70	65,88	66,95	

4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Sigi Tahun 2025-2029, penggunaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan bagian yang sangat vital untuk memonitor progres dan efektivitas implementasi kebijakan serta program pembangunan daerah. IKK ini dirancang untuk mengukur seberapa baik kinerja setiap elemen yang terlibat dalam proses perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan inovasi di tingkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Renstra ini mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keselarasan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra PD, hingga penerapan hasil kajian berbasis bukti dalam kebijakan pembangunan daerah. Penekanan pada keselarasan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra PD, bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis dengan baik, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.



Selain itu, penekanan pada Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan menyelesaikan berbagai permasalahan daerah. Dengan menggunakan IKK ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi akan dapat mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, serta memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

Tabel berikut ini menunjukkan target kinerja untuk setiap indikator yang direncanakan dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian target-target ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Penduduk, Kualitas Keluarga dan kesejahteraan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra DPPKB Kabupaten Sigi
Tahun 2025-2029

INDAKATOR	Satuan	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1. Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,29	2,28	2,28	2,27	2.26	
2. Presentase Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15-19 / Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	%	41,9	41,2	40,60	40,00	39,40	38,80	
3. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (Proportion of Demand Satisfied by modern)	%	81,4	81,5	81,6	81,8	81,9	82	



Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan IPBK	%	61,30	62,70	64,00	65,30	66,30	66,70	
Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga)	%	61,24	62,35	63,50	64,70	65,88	66,95	
Indeks Lansia Berdaya	%	62,5	63,2	63,9	64,6	65,3	66	
Indeks Pengasuhan Remaja	%	85,5	86,5	87,4	88,5	89,5	90.5	
Proporsi Kampung KB mandiri	%	5.9	6,4	6,9	7,4	8	8,6	
Persentase Kehamilan Tidak diinginkan (KTD)	%	15,1	14,2	13,3	12,5	11,7	11	
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	63,39	63,67	63,68	63,69	63,70	63,71	



BAB V
PENUTUP

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah perencanaan yang berkualitas, yang mencerminkan skala prioritas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan berpeluang memberikan partisipasi masyarakat dan dapat menjamin transparansi.

Perencanaan sebagai prosesi awal dari pelaksanaan pembangunan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka panjang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Disisi lain untuk mewujudkan Kualitas Keluarga yang sejahtera dengan memenuhi Kriteria dibutuhkan peran dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga kabupaten Sigi yang berkesinambungan.

Semoga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sigi dapat menggambarkan dan menjabarkan visi RPJMD Kabupaten Sigi tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan yaitu “KABUPATEN SIGI, MAJU BERKELANJUTAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA”.

Sigi, Agustus 2025

**Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kabupaten Sigi



RIADIN, S.Sos, M.Si

NIP. 196805021990031015